
OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TABALONG: SEBUAH PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK

Muhammad Noor Ifansyah ¹✉

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
mnifansyah@stiatabalong.ac.id

Abstrak

Permasalahan sampah di Indonesia terus menjadi persoalan yang belum dapat sepenuhnya diatasi. Pertumbuhan timbulan sampah di Indonesia selama tiga tahun terakhir 2020-2023 terus mengalami peningkatan yaitu berjumlah sebesar 37.370.425 Ton/thn. Dalam ranah global pengelolaan sampah merupakan kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan sampah erat kaitannya dengan pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan sampah dalam sudut pandang administrasi publik dilihat dari konteks good governance. Penelitian ini didesain menggunakan studi pustaka yang secara teoritis, studi pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep triangulasi data dari berbagai sumber pustaka yang ditemukan dengan mengacu pada pemikiran model analisis interaktif yang dikembangkan. Hasil analisis kemudian dijadikan rangkuman yang dapat ditarik kesimpulan tentang topik penelitian. Kebijakan pengelolaan sampah yang telah ada di Kabupaten Tabalong sangatlah penting dalam menjamin berlangsungnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sehingga dengan adanya kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah memainkan peran penting dalam upaya memerangi timbulan sampah yang terus bertambah. Penelitian terdahulu menyarankan model pendekatan dinamis dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan. Bahkan ada pula yang menekankan pada restrukturisasi lembaga dan penyusunan kebijakan baru perlu dibuat dalam rangka membangun sistem pengelolaan sampah yang holistik, terintegrasi dan hemat biaya. Pada pengelolaan sampah pada Kabupaten Tabalong Pemerintah Kabupaten Tabalong melimpahkan kegiatan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan. Sampah yang telah dipilah tidak akan memiliki nilai apabila pengepul tidak bersedia membeli. Sehingga guna memberikan jaminan keberlangsungan sirkulasi penjualan pilah sampah, Dinas Lingkungan Hidup terus memberikan pendampingan dan bekerjasama dengan pengepul. Sehingga sangat penting bagi masyarakat

mengetahui kegiatan pengelolaan sampah yang telah dilakukan dan akan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: *pengelolaan sampah, kebijakan publik, partisipasi*

Abstract

Indonesia's garbage problem is still one that will never be completely fixed. Over the previous three years, from 2020 to 2023, Indonesia's garbage output has increased steadily, reaching 37,370,425 tons annually. The Sustainable Development Goals of the United Nations include waste management as a framework on a worldwide scale. Waste management and the accomplishment of various sustainable development goals are strongly tied, according to several earlier research. The purpose of this study is to learn more about waste management from the standpoint of public administration within the framework of good governance. A theoretical literature review was used to construct this investigation. Utilizing the idea of data triangulation from a variety of literature sources, the analysis was conducted by consulting the concepts of the interactive analysis model. After that, a summary of the analysis findings is provided so that conclusions on the study's subject may be made. To ensure sustainable trash management, Tabalong Regency's current waste management policy is crucial. Therefore, efforts to stop the rising amount of garbage generated depend heavily on the presence of rules controlling waste management. In their study, last proposed a dynamic approach model for formulating management policies. Even stressed that in order to create a comprehensive, integrated, and economical waste management system, new policies must be prepared and institutions must be restructured. The Environmental Agency handles trash management in Tabalong District after receiving delegations from the Tabalong District Government, with the community serving as the primary player. If collectors are unwilling to purchase sorted waste, it will be worthless. The Environmental Service continues to support collectors and work together to ensure the continuous flow of garbage sorting sales. Therefore, it is necessary for the community to be aware of the waste management initiatives that have been implemented, since this will boost community involvement.

Keyword: waste management, public policy, participation

A. Pendahuluan

Permasalahan sampah di Indonesia terus menjadi persoalan yang belum dapat sepenuhnya diatasi. Pertumbuhan timbulan sampah di Indonesia selama tiga tahun terakhir 2020-2023 terus mengalami

peningkatan yaitu berjumlah sebesar 37.370.425 Ton/thn (SIPSN, 2024). Dalam ranah global pengelolaan sampah merupakan kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Sustainable Development Goals/UN-SDGs). SDGs bertujuan dalam mengatasi permasalahan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kemakmuran, dengan pengelolaan sampah memainkan peran penting dalam beberapa tujuan tersebut.

Pendekatan dalam pengelolaan sampah dengan ekonomi sirkular, pendekatan ini penting digunakan terutama dalam konteks pemulihan pasca-COVID, dengan menyelaraskan prinsip kesehatan, lingkungan, nilai sumber daya, dan pembangunan ekonomi, serta dapat mengarah pada peningkatan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat (Sharma et al., 2021; Yanto et al., 2021). Pengelolaan sampah yang efektif, terutama sampah rumah tangga sangat penting dalam mencapai SDG 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), kegiatan ini dapat difasilitasi melalui keterlibatan masyarakat dan program-program penyadaran (Fithriana & Annissa, 2018).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan sampah erat kaitannya dengan pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya berdasarkan penelitian yang dilakukan Bhuiyan (2010) menemukan bahwa pengelolaan sampah akan efektif apabila terjalin kemitraan antara publik-swasta. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Bolaane & Isaac (2015) bahwa pengelolaan sampah akan efektif apabila ada keterlibatan sektor privat meskipun masih tetap harus mengandalkan sektor publik dalam pelaksanaannya. Peran sektor publik tidak bisa dikesampingkan sebagai pelaku utama dalam ranah pembangunan kebijakan dan infrastruktur dalam mendukung pengelolaan sampah seperti yang ditemukan oleh Di Nola et al. (2018). Hal tersebut akhirnya menjadikan pendekatan ekonomi sirkular, pelibatan masyarakat, dukungan kebijakan, dan inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah menjadi energi diidentifikasi sebagai strategi utama integrasi pengelolaan sampah dengan pencapaian tujuan SDGs. Pada penelitian ini pengelolaan sampah dipandang

dari sudut administrasi publik yang melihat pengelolaan sampah sebagai tata kelola.

Tata kelola dalam pengelolaan sampah merupakan aspek penting dalam perencanaan kota dan kelestarian lingkungan. Tata kelola ini melibatkan struktur, proses, dan praktik yang menjadi panduan dalam mengelola sampah, sehingga memberikan implikasi positif bagi perubahan iklim, mengurangi penipisan sumber daya, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Perubahan terus menerus terjadi dalam tata kelola sampah, sejak zaman birokrasi tradisional, *new public management*, dan era *governance* (Bugge et al., 2019). Menurut (Bhuiyan, 2010) *good governance* sangat penting dalam pengelolaan sampah yang efektif, dan kurangnya *good governance* menyebabkan layanan yang tidak memadai sehingga dapat mendorong tumbuhnya inisiatif berbasis masyarakat dan kemitraan publik-swasta dalam penyediaan layanan sampah. Mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi tantangan jika ketiga sektor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat tidak bekerjasama secara baik dan saling dukung (Hamdillah, 2023).

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat diharapkan dalam mendukung program yang telah dibangun oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat pada pengelolaan sampah menunjukkan hasil yang positif yaitu terjadinya penurunan dampak lingkungan dari timbulan sampah (Bortoleto & Hanaki, 2007). Sehingga dalam artikel ini mencoba mengungkapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong dalam sudut pandang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat (publik) merupakan sebuah rangkaian dalam rangka keterbukaan informasi publik (Creighton, 2005). Masyarakat akan berpartisipasi apabila informasi telah sampai kepihak masyarakat, sehingga turut mengakibatkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang telah diatur dalam tata kelola persampahan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah dengan cara yang beragam, hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Tata kelola pengelolaan sampah merupakan masalah yang membutuhkan keseimbangan dalam pengelolaannya, integrasi kemitraan publik-swasta, dan adopsi strategi tata kelola yang adaptif perlu dilakukan. Tantangan ini merupakan masalah yang dihadapi berbagai daerah, sehingga memerlukan pendekatan tata kelola yang mampu mendorong tumbuhnya inisiatif berbasis masyarakat dan kemitraan pemerintah-swasta. Pentingnya pengelolaan sampah dalam rangka pelayanan publik memegang peranan penting dalam mendukung *good governance*, sehingga dalam artikel ini mengungkap pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong, kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan sampah dalam sudut pandang administrasi publik dilihat dari konteks *good governance*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini didesain menggunakan studi pustaka yang secara teoritis, studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Hamdillah, 2023). Studi pustaka dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dalam konteks yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Sumber utama data menggunakan tinjauan literatur yang meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, dan publikasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah terutama pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong sebagai lokasi penelitian.

Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep triangulasi data dari berbagai sumber pustaka yang ditemukan dengan mengacu pada pemikiran model analisis interaktif yang dikembangkan oleh (Miles, Matthew B. Huberman, A Michael. Saldana, 2014). Tahapan dalam analisis dimulai dengan mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian diidentifikasi sebagai temuan utama yang berkaitan dengan teori yang relevan yang menggambarkan fenomena penelitian.

Hasil analisis kemudian dijadikan rangkuman yang dapat ditarik kesimpulan tentang topik penelitian. Kesimpulan merupakan hasil sintesis sumber-sumber yang telah digali melalui studi pustaka. Penelitian akan menggali wawasan tentang pengelolaan sampah dalam sudut pandang administrasi publik yang nantinya akan berkontribusi dalam penerapan *governance*.

C. Hasil Penelitian/diskusi

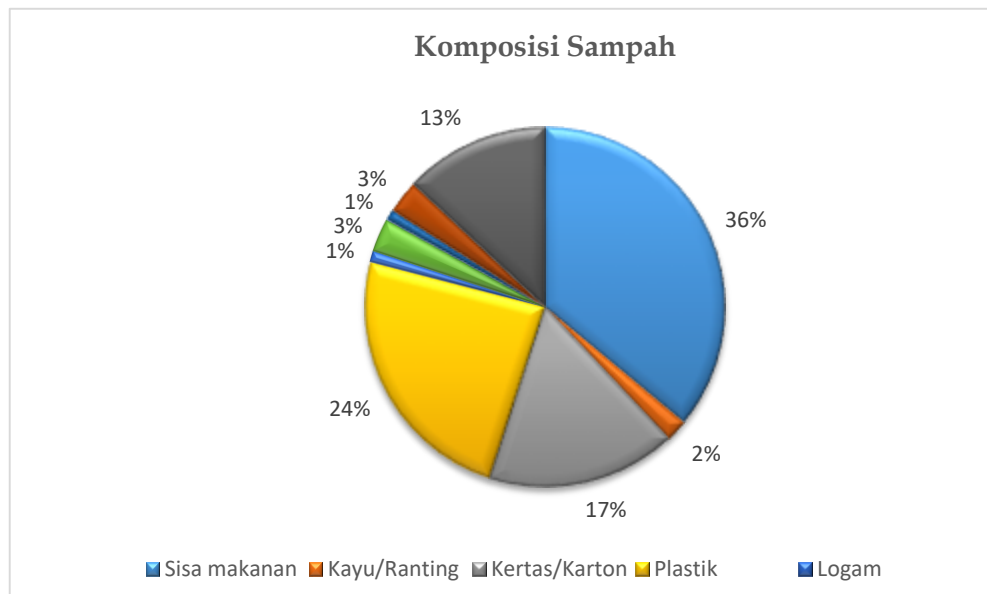
Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong

Kabupaten Tabalong merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kabupaten Tabalong juga menghadapi berbagai tantangan dan mengalami perkembangan diberbagai sektor. Tantangan tersebut antara lain pengelolaan sampah, konsumsi energi, pembalakan liar, pendidikan, pariwisata, bantuan sosial, pembangunan manusia, partisipasi politik, kebutuhan ruang terbuka hijau, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menerapkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan pendirian Bank Sampah serta Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu *Reduce Reuse Recycle* (TPS3R). Pengelolaan sampah yang telah dilakukan berlandaskan kebijakan sebagai dasar rencana pemerintah untuk mengatur kepentingan khalayak ramai atau masyarakat luas. Kebijakan utama yang menjadi dasar pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan untuk tingkat kabupaten Pemerintah Kabupaten Tabalong menerbitkan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong.

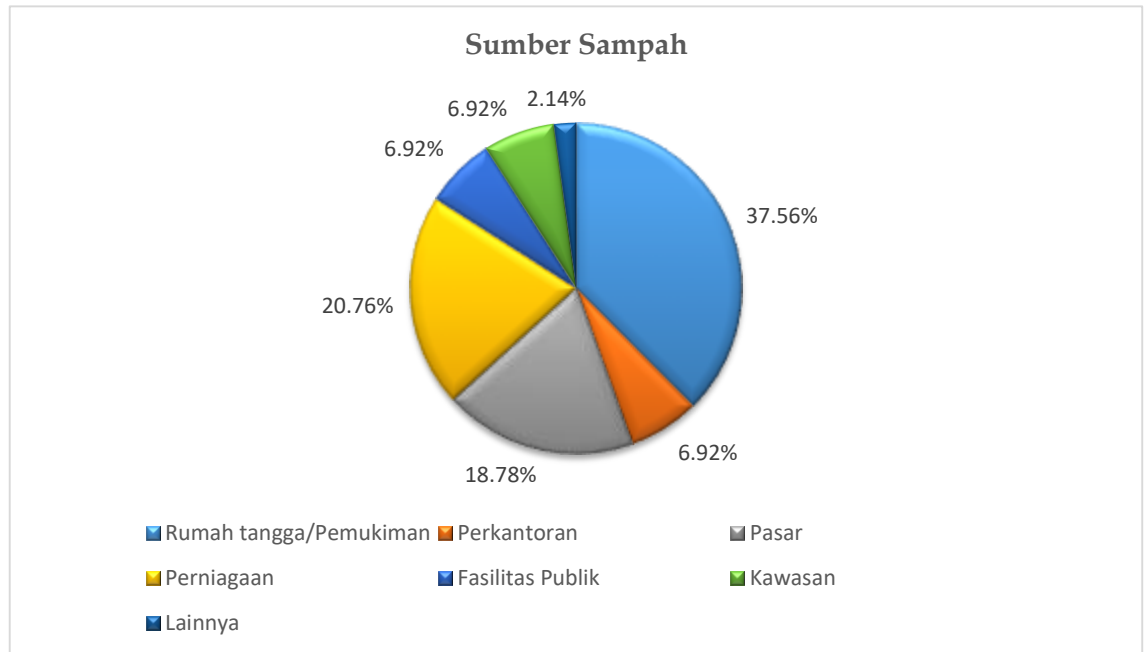
Upaya pengelolaan sampah tidak hanya terbatas pada terbitnya Peraturan Daerah, tetapi juga pada kegiatan yang dilaksanakan, seperti pada tahun 2016 melalui Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau (Genta Hijau). Genta Hijau bertujuan

melibatkan masyarakat dalam pengurangan sampah, pelibatan masyarakat pada Bank Sampah, dan TPS3R (Ifansyah et al., 2023). Hal ini terus dilaksanakan dalam rangka pengurangan timbulan sampah pada tahun 2022 berjumlah 37.507,84 Ton/thn yang komposisinya terdiri dari sisa makanan, kayu/ranting, kertas/karton, plastik, logam, kain, kaca, dan lainnya. Komposisi sampah di Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Komposisi Sampah Kabupaten Tabalong Tahun 2022

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa komposisi sampah di Kabupaten Tabalong Tahun 2022 didominasi oleh sisa makanan yaitu sebanyak 36% dari total timbulan sampah atau sebanyak 13.502,82 Ton/thn. Hal ini menunjukkan bahwa timbulan sampah sebagian besar merupakan hasil timbulan dari manusia yang merupakan penyumbang utama timbulan sampah, hal ini juga dibuktikan dengan besaran sumber sampah yang sebagian besar berasal dari pemukiman atau rumah tangga. Sehingga upaya pengurangan sampah diperlukan keterlibatan manusia dalam setiap kegiatannya. Besarnya sumber sampah yang berasal dari pemukiman atau rumah tangga dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Sumber Sampah Kabupaten Tabalong Tahun 2022

Pada gambar 2 diketahui bahwa sumber sampah terbesar berasal dari rumah tangga atau pemukiman yaitu sebesar 37,56% dari total timbulan sampah atau sebanyak 14.087,94 Ton/thn sampah, sehingga dapat diketahui bahwa sumber utama yang mendominasi timbulan sampah bersumber dari rumah tangga. Sehingga peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan hal yang tidak bisa diabaikan.

Berdasarkan penelusuran pada *website* Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, sampai dengan tahun 2024, Kabupaten Tabalong telah memiliki 10 (sepuluh) Bank Sampah aktif dan 10 (sepuluh) unit TPS3R yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tabalong.

No	Nama Fasilitas	Sampahmasuk (kg/thn)	Sampahterkelola (kg/thn)	Kecamatan	Pengelola
1	Bank Sampah Unit Mekar Sari Bersih	20,280.00	20,208.00	Murung Pudak	LSM
2	Bank Sampah Unit Berlian Bersinar	2,460.00	2,268.00	Tanta	LSM
3	Bank Sampah Unit Anggrek	9,384.00	9,368.40	Murung Pudak	LSM
4	Bank Sampah Unit Jangkung Hijau	23,400.00	22,524.00	Tanjung	LSM
5	Bank Sampah Unit Maluyung Bersinar	12,264.00	10,380.00	Murung Pudak	LSM
6	Bank Sampah Unit Berkah Bersama	5,400.00	5,352.00	Tanjung	LSM
7	Bank Sampah Unit Harapan Baru	3,648.00	3,576.00	Murung Pudak	LSM
8	Bank Sampah Permata Hati	2,940.00	2,760.00	Murung Pudak	LSM
9	Bank Sampah Bougenville Permai	1,176.00	1,026.00	Murung Pudak	LSM
10	Bank Sampah Ribang	9,552.00	9,420.00	Muara Uya	LSM
Jumlah		90,504.00	86,882.40		

Tabel 1. Daftar Bank Sampah di Kabupaten Tabalong Tahun 2023

Pada Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa Bank Sampah di Kabupaten Tabalong berjumlah 10 unit, dengan jumlah sampah masuk bervariasi. Jumlah sampah masuk terbanyak pada Bank Sampah Unit Jangkung Hijau yaitu 23.400 Kg/Thn, sedangkan jumlah sampah masuk terkecil pada Bank Sampah Bougenville Permai yaitu 1.176 Kg/Thn. Berdasarkan Tabel 1 juga diketahui bahwa cakupan layanan Bank Sampah masih sedikit yakni hanya melayani 4 (empat) kecamatan sedangkan jumlah keseluruhan kecamatan di Tabalong sebanyak 12 (dua belas) kecamatan. Dari jumlah Bank Sampah yang telah ada hanya mampu melayani 30% wilayah Kabupaten Tabalong.

No	Nama Fasilitas	Sampahmasuk (kg/thn)	Sampahterkelola (kg/thn)	Kecamatan	Pengelola
1	Bank Sampah Unit Mekar Sari Bersih	20,280.00	20,208.00	Murung Pudak	LSM
2	Bank Sampah Unit Berlian Bersinar	2,460.00	2,268.00	Tanta	LSM
3	Bank Sampah Unit Anggrek	9,384.00	9,368.40	Murung Pudak	LSM
4	Bank Sampah Unit Jangkung Hijau	23,400.00	22,524.00	Tanjung	LSM
5	Bank Sampah Unit Maluyung Bersinar	12,264.00	10,380.00	Murung Pudak	LSM
6	Bank Sampah Unit Berkah Bersama	5,400.00	5,352.00	Tanjung	LSM
7	Bank Sampah Unit Harapan Baru	3,648.00	3,576.00	Murung Pudak	LSM
8	Bank Sampah Permata Hati	2,940.00	2,760.00	Murung Pudak	LSM
9	Bank Sampah Bougenville Permai	1,176.00	1,026.00	Murung Pudak	LSM
10	Bank Sampah Ribang	9,552.00	9,420.00	Muara Uya	LSM
Jumlah		90,504.00	86,882.40		

Tabel 2. Daftar TPS3R di Kabupaten Tabalong Tahun 2023

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah TS3R aktif di Kabupaten Tabalong berjumlah 10 (sepuluh) unit dengan penerima sampah masuk terbanyak pada TPS3R Menanti Padang Panjang dan TPS3R Pendopo Bersinar yaitu sebanyak 287,62 Ton/thn. Sedangkan sampah masuk terkecil pada TPS3R Bina Lestari sebanyak 130,67 Ton/thn. Sementara sebaran lokasi TPS3R berlokasi di 5 (lima) wilayah kecamatan dari 12 (dua belas) kecamatan yang ada pada Kabupaten Tabalong.

Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong

Pengelolaan sampah di Indonesia merupakan isu penting yang meliputi berbagai tantangan dan strategi, termasuk penanganan sampah kota dan sampah plastik. Indonesia sedang menjajaki berbagai kebijakan dan pendekatan untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah, yang

tujuannya untuk keberlanjutan. Sistem pengelolaan sampah di Indonesia membutuhkan integrasi teknologi guna peningkatan keberlanjutan dan mengatasi tantangan dalam pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah, serta berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Fatimah et al., 2020).

Tantangan dalam proses pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah tentu akan sangat dipengaruhi oleh perlunya perbaikan sistem transportasi sampah, infrastruktur, dan teknologi yang tepat dalam pengolahan sampah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Wisnubroto et al., 2021), yang menyatakan bahwa faktor penanganan sampah dipengaruhi oleh transportasi, infrastruktur, dan teknologi. Sehingga sangat penting untuk menjadikan transportasi, infrastruktur, dan teknologi sebagai dasar dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah yang telah dijalankan di Kabupaten Tabalong merupakan adaptasi dari pengelolaan sampah yang telah dilakukan, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Orientasi pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong merupakan representasi dari Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008) yang kemudian direpresentasikan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Tabalong. Pada Peraturan Daerah tersebut mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, dengan fokus utama pengurangan sampah dari sumbernya.

Sampah yang dikelola di Kabupaten Tabalong merupakan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah Tangga (Perda No. 14 Tahun 2017 Pasal 10) merupakan sampah yang banyak menjadi sumber utama sampah di Tabalong. Sehingga perlu melibatkan banyak pihak dalam pengelolaan sampah, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut pihak yang dapat melaksanakan kerjasama dan kemitraan. Selain itu juga dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah (Pasal 46). Peran serta masyarakat sangat penting dalam pengelolaan

sampah terutama sampah rumah tangga yang merupakan sumber terbesar timbulan sampah di Tabalong. Hal ini sejalan dengan pendapat (Kurniawan et al., 2021; Subekti, 2023) pengelolaan sampah akan lebih efektif dengan partisipasi pemangku kepentingan dan dengan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, salah satunya dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Bahkan solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat dianggap sangat penting diterapkan di Jakarta (Pasang et al., 2007; Verawati & Tuti, 2020).

Kebijakan pengelolaan sampah yang telah ada di Kabupaten Tabalong sangat penting dalam menjamin berlangsungnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Hal ini didukung oleh kajian dari (Lodan et al., 2022) yang menyatakan bahwa kunci penting yang mempengaruhi kematangan pengelolaan sampah adalah perlunya kebijakan yang baik guna mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah. Selain itu kebijakan yang telah dibuat harus dapat diterima oleh masyarakat sehingga program yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan (Fukuda et al., 2018; Wahyu Maesarini, 2023). Sehingga dengan adanya kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah memainkan peran penting dalam upaya memerangi timbulan sampah yang terus bertambah.

Dilakukan pula pengembangan konsep keberlanjutan pembangunan dalam sistem pengelolaan sampah dari konsep bank sampah ditingkat Rukun Tetangga hingga TPS 3R ditingkat Kelurahan secara nasional. Ada beberapa penelitian terkait keberlanjutan sistem pengelolaan sampah ini. Di Nola et al., (2018) dalam penelitiannya menyarankan model pendekatan dinamis dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan. Bahkan Manaf, et al. (2009) menekankan pada restrukturisasi lembaga dan penyusunan kebijakan baru perlu dibuat dalam rangka membangun sistem pengelolaan sampah yang holistik, terintegrasi dan hemat biaya.

Senada dengan penelitian (Di Nola et al., 2018) dan (Manaf et al., 2009) mengenai keberlanjutan sistem pengelolaan sampah, hasil kajian (Esmaeilian et al., 2018) menawarkan kerangka konseptual untuk mengatasi

kesenjangan dalam pengelolaan sampah dari *sustainable smart cities* ke *sustainable zero waste cities* yang memerlukan empat strategi utama yang saling terkait, yaitu: pencegahan sampah, pemisahan sampah, pengumpulan sampah tepat waktu, dan pemulihan nilai dari sampah yang terkumpul. Pada beberapa kajian ini, terlihat bahwa keberlanjutan sistem pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Kabupaten Tabalong melalui kegiatan Bank Sampah di tingkat RT dan TPS3R hingga menjadi TPS di tingkat kelurahan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong

Partisipasi menjadi semakin umum dalam pengambilan keputusan pemerintah dan dianggap sebagai bagian dari definisi demokrasi.. Partisipasi masyarakat sekarang merupakan persyaratan untuk pengambilan keputusan pemerintah disebagian besar dunia barat (Creighton, 2005). Partisipasi masyarakat seringkali dicirikan sebagai hasil yang tidak terhindarkan dari gerakan logis dari mode pemerintahan yang terisolasi dan birokratis ke pemeritahan terbuka, transparan, dan partisipatif (Moynihan, 2003).

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah sebuah konsep yang menimbulkan sejumlah besar kontroversi dan perdebatan. Keterlibatan warga negara yang aktif dan terlibat sangat menarik bagi banyak orang, praktiknya partisipasi warga negara langsung jauh lebih merepotkan. Salah satu sisinya adalah pendukung partisipasi langsung, yang percaya masyarakat harus memiliki peran aktif dan langsung dalam proses pemerintahan. Menciptakan peluang bagi orang-orang untuk terlibat secara lebih bermakna dengan pemerintahan dipandang sebagai cara untuk membangun kepercayaan, meningkatkan transparansi, dan lebih baik memungkinkan publik untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas hasilnya.

Sisi yang berseberangan adalah pendukung partisipasi tidak langsung, yang percaya bahwa keputusan negara sebaiknya diserahkan kepada pejabat terpilih dan administrator profesional. Gagasan membuka proses

deliberative bagi publik adalah naif secara politis dan tidak dapat dipertahankan dalam birokrasi modern negara. Tidak realistis untuk mengharapkan orang yang berkuasa untuk membagikan kekuasaan mereka atas nama partisipasi (Callahan, 2007).

Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>). Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu.

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemadirian dan proses pemberdayaan (Fawcett et al., 1995), menjelaskan pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut.

Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Sementara (Creighton, 2005), lebih menekankan partisipasi sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik, sehingga publik dapat menanggapi dan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang harus dilakukan. Dan juga keputusan apa yang akan digunakan sehingga memberikan efek yang bermanfaat bagi publik. Partisipasi paling baik dipahami sebagai sebuah kontinum. Karena ini adalah sebuah rangkaian,

terdapat jumlah poin yang benar-benar tak terbatas disepanjang skala, tetapi ada empat kategori utama yaitu informasi publik, mendengar aspirasi publik, pelibatan publik dalam pemecahan masalah, dan membangun kesepakatan bersama.

Kontinum partisipasi terdiri dari empat kategori utama yang dijelaskan Creighton sebagai berikut:

1. Program informasi publik pada dasarnya adalah komunikasi satu arah kepada publik. Sebagai bagian integral dalam keputusan sering diperdebatkan dalam literatur partisipasi publik karena berupaya mempertahankan bentuk paternalistik (*top down*) pembuatan keputusan. Tetapi meskipun informasi publik yang dibuat sendiri oleh penguasa bukan merupakan partisipasi publik, itu tetap merupakan komponen penting dari program partisipasi publik yang efektif. Masyarakat tidak dapat berpartisipasi kecuali jika mereka menerima informasi yang lengkap dan obyektif yang menjadi dasar penilaian mereka.
2. Tingkatan berikutnya memerlukan partisipasi masyarakat yang lebih aktif berupa kegiatan bersifat dengar pendapat umum (*public hearing, listen to the public*). Publik dapat menyampaikan komentar atau tanggapan atas rencana yang akan diputuskan. Tetapi dalam praktiknya dengar pendapat sering dilaksanakan hanya sekedar memenuhi prosedur formal saja, secara substansi miskin partisipasi. Hasilnya dapat diketahui, keputusan yang diambil tidak memberi ruang bagi pemecahan masalah yang bersifat kolaboratif.
3. Kontinum ketiga partisipasi lebih melibatkan masyarakat dalam pemecahan masalah. Tingkat partisipasi pada level ini tidak selalu menghasilkan kesepakatan. Istilah “sepakat untuk tidak sepakat” dapat dianggap sebagai suatu cara untuk mengungkap argumen dibalik sebuah keputusan. Pada level ini tersedia ruang publik untuk saling mencurahkan gagasan dianggap sebagai capaian, apalagi jika

kesepakatan yang dibangun akan memberikan legitimasi bagi lembaga.

4. Level keempat adalah partisipasi yang mampu membangun kesepakatan. Untuk mencapai suatu kesepakatan penuh, memerlukan suatu proses, dengan mencari dan membangun konsesi. Membangun konsesi dapat diartikan sebagai proses pencarian kesepakatan bulat, membangun kesepakatan ini tidak datang tiba-tiba. Hal ini melibatkan itikad baik semua pihak untuk mempertemukan kepentingan semua *stakeholder*. Manfaat yang diperoleh dengan pendekatan kesepakatan adalah jika terbentuk persetujuan yang sejati, menjamin lembaga dapat menjalankan pelaksanaan dengan kepercayaan yang wajar.

Banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang partisipasi. Namun secara harfiah, partisipasi berarti "turut berperan serta dalam suatu kegiatan", "keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan", "peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan". Partisipasi dapat didefinisikan sebagai "bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan berdasarkan informasi yang mereka terima".

Dengan proses partisipatif, diharapkan masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk: (1) secara kritis menilai lingkungan sosial ekonomi mereka sendiri dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki, (2) menentukan visi yang ingin diwujudkan masyarakat, (3) berperan dalam merencanakan masa depan mereka sendiri tanpa menyerahkan kepada pihak lain atau kelompok berkuasa, (4) menghimpun sumber-sumber daya yang ada untuk merealisasikan tujuan bersama, (5) memperoleh pengalaman dalam menganalisis, mengidentifikasi strategi yang tepat dan realistis untuk kehidupan yang baik, (6) menjadi tokoh individual yang bekerja atas dasar persamaan, (7) menyelesaikan tugas dan kegiatan secara swadaya, karena tidak ada ketergantungan dengan pihak luar yang menjadi dasar menuju kemandirian, (8) terjadinya hubungan yang erat dan *integrative* dalam masyarakat (Hadi, 2015).

Pada pengelolaan sampah pada Kabupaten Tabalong Pemerintah Kabupaten Tabalong melimpahkan kegiatan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan. Proses pengelolaan sampah melibatkan pihak swasta walaupun tidak secara langsung. Pihak ketiga yang sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah adalah pengepul. Sampah yang telah dipilah tidak akan memiliki nilai apabila pengepul tidak bersedia membeli. Sehingga guna memberikan jaminan keberlangsungan sirkulasi penjualan pilah sampah, Dinas Lingkungan Hidup terus memberikan pendampingan dan bekerjasama dengan pengepul.

Aspek informasi menurut (Colon & Fawcett, 2006) pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu pendukung dalam pengembangan layanan pengolahan sampah yang dilakukan. Sehingga sangat penting bagi masyarakat mengetahui kegiatan pengelolaan sampah yang telah dilakukan dan akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi KSM dan pihak swasta telah mampu menguatkan sistem pengelolaan sampah yang selama ini hanya dikelola oleh Pemerintah, bahkan mampu mengubah kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan pernyataan ini sejalan dengan pendapat (Ahsan et al., 2012; Bolaane & Isaac, 2015; Bortoleto & Hanaki, 2007; Lu & Sidortsov, 2019).

D. KESIMPULAN

Pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong telah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan administrasi publik. Kebijakan publik merupakan dasar utama dalam praktik pengelolaan sampah, ini dilihat dari adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Selain itu dalam praktiknya pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong telah melibatkan masyarakat hal ini dilihat dari terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan sampah tingkat rumah tangga, yaitu melalui Bank Sampah dan TPS3R.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, A., Alamgir, M., Imteaz, M., Nik Daud, N. N., & Islam, R. (2012). Role of NGOs and CBOs in waste management. *Iranian Journal of Public Health*, 41(6), 27–38.
- Bhuiyan, S. H. (2010). A crisis in governance: Urban solid waste management in Bangladesh. *Habitat International*, 34(1), 125–133. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2009.08.002>
- Bolaane, B., & Isaac, E. (2015). Privatization of solid waste collection services: Lessons from Gaborone. *Waste Management*, 40, 14–21. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.03.004>
- Bortoleto, A. P., & Hanaki, K. (2007). Report: Citizen participation as a part of integrated solid waste management: Porto Alegre case. *Waste Management and Research*, 25(3), 276–282. <https://doi.org/10.1177/0734242X07079204>
- Bugge, M. M., Fevolden, A. M., & Klitkou, A. (2019). Governance for system optimization and system change: The case of urban waste. *Research Policy*, 48(4), 1076–1090. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.10.013>
- Callahan, K. (2007). Measurement, Accountability and Participation. In J. Rabin (Ed.), *Public Administration and Public Policy* (Vol. 126, Issue March). CRC Press.
- Colon, M., & Fawcett, B. (2006). Community-based household waste management: Lessons learnt from EXNORA's "zero waste management" scheme in two South Indian cities. *Habitat International*, 30(4), 916–931. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2005.04.006>
- Creighton, J. L. (2005). The public participation handbook: making better decisions through citizen involvement. In *Jossey-Bass A Willey Imprint*. https://www.mendeley.com/research-papers/comparative-study-effectiveness-step-step-multiple-static-graphics-animated-graphics-instructional-me/?utm_source=desktop&utm_medium=1.17.10&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B5400b954-c8c1-447d-aca6-02eecd

-
- Di Nola, M. F., Escapa, M., & Ansah, J. P. (2018). Modelling solid waste management solutions: The case of Campania, Italy. *Waste Management*, 78, 717–729. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.06.006>
- Esmailian, B., Wang, B., Lewis, K., Duarte, F., Ratti, C., & Behdad, S. (2018). The future of waste management in smart and sustainable cities: A review and concept paper. *Waste Management*, 81, 177–195. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.09.047>
- Fatimah, Y. A., Govindan, K., Murniningsih, R., & Setiawan, A. (2020). Industry 4.0 based sustainable circular economy approach for smart waste management system to achieve sustainable development goals: A case study of Indonesia. *Journal of Cleaner Production*, 269, 122263. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122263>
- Fawcett, S. B., Paine-Andrews, A., Francisco, V. T., Schultz, J. A., Richter, K. P., Lewis, R. K., Williams, E. L., Harris, K. J., Berkley, J. Y., Fisher, J. L., & Lopez, C. M. (1995). Using empowerment theory in collaborative partnerships for community health and development. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 677–697. <https://doi.org/10.1007/BF02506987>
- Fithriana, A., & Annissa, J. (2018). Waste Creation On Achieving 12th Sustainable Development Goals (SDGs). *ICCD*, 1(1), 617–627. <https://doi.org/10.33068/iccd.Vol1.Iss1.91>
- Fukuda, K., Isdwiyani, R., Kawata, K., & Yoshida, Y. (2018). Measuring the impact of modern waste collection and processing service attributes on residents' acceptance of waste separation policy using a randomised conjoint field experiment in Yogyakarta Province, Indonesia. *Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy*, 36(9), 841–848. <https://doi.org/10.1177/0734242X18793939>
- Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya*, 1987, 1–14.
- Hamdillah, H. (2023). Inovasi Pelayanan Publik dan Transformasi Birokrasi: Pendekatan Administrasi Publik dalam Meningkatkan Good Governance.

-
- Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 91–102.
<https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i2.5672>
- Ifansyah, M. N., Purwanto, P., Purnaweni, H., Yuniningsih, T., & Anwar, A. (2023). Community-Based Waste Management in Tabalong Regency. *Jurnal Public Policy*, 9(1), 50. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i1.6189>
- Kurniawan, T. A., Avtar, R., Singh, D., Xue, W., Dzarfan Othman, M. H., Hwang, G. H., Iswanto, I., Albadarin, A. B., & Kern, A. O. (2021). Reforming MSWM in Sukunan (Yogyakarta, Indonesia): A case-study of applying a zero-waste approach based on circular economy paradigm. *Journal of Cleaner Production*, 284, 124775. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124775>
- Lodan, K. T., Salsabila, L., Dompok, T., Rorong, M. J., & Khairina, E. (2022). Key factors influencing Indonesia's solid waste management maturity (a study of piyungan landfill, yogyakarta). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1105(1), 012046. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1105/1/012046>
- Lu, H., & Sidortsov, R. (2019). Sorting out a problem: A co-production approach to household waste management in Shanghai, China. *Waste Management*, 95, 271–277. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.06.020>
- Manaf, L. A., Samah, M. A. A., & Zukki, N. I. M. (2009). Municipal solid waste management in Malaysia: Practices and challenges. *Waste Management*, 29(11), 2902–2906. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2008.07.015>
- Miles, Matthew B. Huberman, A Michael. Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publication, Inc.
- Moynihan, D. P. (2003). Normative and Instrumental Perspectives on Public Participation: Citizen Summits in Washington, D.C. *American Review of Public Administration*, 33(2), 164–188. <https://doi.org/10.1177/0275074003251379>
- Pasang, H., Moore, G. A., & Sitorus, G. (2007). Neighbourhood-based waste management: A solution for solid waste problems in Jakarta, Indonesia.

-
- Waste Management*, 27(12), 1924–1938.
<https://doi.org/10.1016/j.wasman.2006.09.010>
- Sharma, H. B., Vanapalli, K. R., Samal, B., Cheela, V. R. S., Dubey, B. K., & Bhattacharya, J. (2021). Circular economy approach in solid waste management system to achieve UN-SDGs: Solutions for post-COVID recovery. *Science of The Total Environment*, 800, 149605. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149605>
- Subekti, R. (2023). A Circular Economy-Based Plastic Waste Management Policy in Indonesia (Compared to China and EU). *Yustisia Jurnal Hukum*, 12(2), 168. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i2.72177>
- Verawati, S., & Tuti, R. W. D. (2020). Policy Implementation of Solid Waste Management in South Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 10(2), 118–126. <https://doi.org/10.31289/jap.v10i2.3107>
- Wahyu Maesarini, I. (2023). Dynamics of Local Government Policy in Waste Management in Indonesia. *Iapa Proceedings Conference*, 287. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2023.896>
- Wisnubroto, D. S., Zamroni, H., Sumarbagiono, R., & Nurliati, G. (2021). Challenges of implementing the policy and strategy for management of radioactive waste and nuclear spent fuel in Indonesia. *Nuclear Engineering and Technology*, 53(2), 549–561. <https://doi.org/10.1016/j.net.2020.07.005>
- Yanto, E., Bustam, B., & Aqfir, A. (2021). Study of the Economic Value of Waste Recycling Concept in Supporting Sustainable Development Goals (SDGs) Program in TPA Kabinuang, Tolitoli Regency. *IJEED (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 4(5), 773–781. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v4i5.1521>